

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH
KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh:

Ahmad Nizomuddin

2110012111044

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

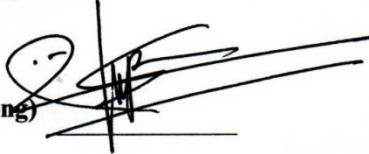
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Ahmad Nizomuddin
Nomor : 2110012111044
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke website

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH
KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Ahmad Nizomuddin, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: ahmadnizomuddin0@gmail.com**

ABSTRACT

Related to the increase in waste volume are the types, varieties, and characteristics of waste that increase over time, based on Article of Jambi Mayor Regulation Number 84 of 2018 concerning Procedures for the Application of Administrative Sanctions to Jambi City Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning Waste Management. Violations of the prohibition on waste disposal are subject to administrative sanctions as the main penalty. Problem formulation: 1) How is Jambi Mayor Regulation No. 84 of 2018 concerning Procedures for the Application of Administrative Sanctions implemented in Jambi? 2) What are the obstacles faced by the Head of the Jambi City Environment Agency in applying administrative sanctions concerning waste management? 3) What efforts have been made by the Head of the Jambi City Environment Agency in the procedures for applying administrative sanctions regarding waste management? The research method used is sociological jurisprudence, with data collection techniques involving document studies and interviews. The data is then analyzed using qualitative analysis, and the research data consists of primary and secondary data. Research results: 1) Implementation of Jambi Mayor Regulation No. 84 of 2018 concerning Procedures for the Application of Administrative Sanctions, namely the Jambi City Environment Agency has implemented the provisions of Jambi Mayor Regulation No. 84 of 2018 concerning Procedures for the Application of Administrative Sanctions, 2) The obstacles faced by the Jambi City Environment Agency include the lack of a team or waste management officers to deal with people who violate the rules and the lack of law enforcement, 3) Efforts made by the Jambi City Environment Agency include conducting direct field visits to the community to directly socialize the procedures for waste disposal.

Keywords: *Implementation, Administrative Sanctions, Waste Management*

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Lingkungan bersih dan tertata rapi menciptakan keindahan kota serta kenyamanan masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan dan tata ruang perlu rioritaskan.¹ Permasalahan sampah

merupakan permasalahan yang sangat serius di Kota Jambi, hal ini tidak terlepas akibat dari corak ekonomi masyarakat Kota Jambi yang bertumpu pada perdagangan dan jasa. Sehingga sampah yang dihasilkan sebagian besar berasal dari kegiatan saha masyarakat seperti perdagangan.² Permasalahan

¹ Ashabul Kahfi, 2017, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, Vol. 4 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm 13.

² Ivan Fauzani Rahajra, dkk, 2023, *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Volume 4 Nomor 3, Mendopo, Jambi, hlm 273.

pengelolaan sampah di Kota Jambi dengan adanya perberlakukan sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan memberikan peringatan pencemaran kepada masyarakat, serta mengendalikan lingkungan hidup di Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA JAMBI NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Jambi?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Jambi
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi

Administratif Tentang Pengelolaan Sampah

3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Kota Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sudah menjalankan sebagaimana aturan yang tertera Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif. Peraturan ini dibentuk dengan bertujuan mendasar yakni sebagai upaya dari pemerintah mencegah kerusakan pada lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi di masa mendatang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif ini semata-mata bertujuan untuk mengindahkan lingkungan sekeliling masyarakat akan berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat Kota Jambi.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah

- a. Kurangnya tim atau petugas pengelola sampah membuat penanganan pelanggaran aturan belum maksimal.

Peran penegak hukum masih minim, padahal pengelolaan sampah memberi banyak manfaat bagi masyarakat, terutama melalui pemilahan, pengelompokan, dan daur ulang sesuai amanat Perda Kota Jambi.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tentang Pengelolaan Sampah

- a. Peninjauan lapangan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait tata cara pembuangan sampah sesuai Perda.
- b. Penerapan sanksi administratif penting untuk menegakkan norma hukum agar kewajiban dan larangan benar-benar dipatuhi.
- c. Meningkatkan Peran Dinas DLH berperan mengawasi, menegakkan aturan, dan memberikan sanksi administratif guna mencegah serta memulihkan kerusakan lingkungan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif dijalankan DLH untuk mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
2. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya peran penegak hukum sehingga pengelolaan sampah belum optimal meski berpotensi besar dalam pemilahan, pengelompokan, dan daur ulang.

3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah meliputi peninjauan lapangan, sosialisasi aturan, penegakan sanksi administratif, serta peningkatan pengawasan dan penindakan demi pencegahan dan pemulihan lingkungan.

B. Saran

1. DLH Kota Jambi perlu meningkatkan kinerja, sarana-prasarana, dan alokasi dana agar penumpukan sampah dapat diminimalisir.
2. Masyarakat perlu menyadari pentingnya kebersihan dengan melakukan pengelolaan dan pemilahan sampah.
3. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah penumpukan sampah di jalan-jalan Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Ashabul Kahfi, 2017, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, Vol. 4 Nomor 1, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm 13.

Ivan Fauzani Rahajra, dkk, 2023, *Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Volume 4 Nomor 3, Mendopo, Jambi, hlm 273.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan

skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.